

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN LAREN TAHUN 2025



**KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Rencana ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPJPD) Kabupaten Lamongan.

Dalam laporan ini kami menyadari akan keterbatasan yang masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya. Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Perubahan Rencana Kerja PD Kecamatan Laren Tahun 2025 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan Demikian mudah – mudahan bermanfa`at.

**CAMAT LAREN**
SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 197110311992031002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATAPENGANTAR	I
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Rentra PD	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD	14
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	16
2.4. Review Terhadap PerubahanPD	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	19
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	19
3.3. Program dan Kegiatan	20
BAB IV PENUTUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laren Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini mempedomi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan, maka perencanaan kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai Pemerintah daerah.

Dalam Renstra PD Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan tetap berpegang pada prinsip Tata Pemerintahan yang baik dan mencakup lima pendekatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Perencanaan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.

5. Pendekatan botom-up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan pencana pembangunan.

Pendekatan Top Down dan Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laren Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Perubahan Rencana Kerja mangandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laren Tahun 2025 adalah:

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang – Undanh Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 49).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Renja yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Dearah Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laren Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laren Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama Tahun 2025 yang sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Laren

Bab. I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Laren, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab. II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisa Kinerja

Pelayanan PD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Riview terhadap awal PD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Orivinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD, Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja PD, yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD, serta Program dan Kegiatan PD.

Bab. IV Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Tabel Program dan Kegiatan .

Bab. V Penutup

Berisi tentang Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD Kecamatan Laren tahun 2024 semua Program / Kegiatan terlaksana sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan DPA tahun 2024 telah terealisasi 96 % , meski capaian kinerja tahun 2024 diatas rata - rata target yang ditetapkan dalam RPJMD,

Adapun evaluasi hasil realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja OPD tahun 2024 adalah Sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Lamongan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2023 (Akhir Priode 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan PD 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
07.01.00	KECAMATAN		2.633.126.900	2.022.198.069	2.633.126.900	2.633.126.900				
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		2.539.086.700	1.948.201.119	2.539.086.700	2.539.086.700		100%	100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu	29.127.100	23.909.500	29.127.100	29.127.100	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Selaras, Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran, Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan PD dalam Dokumen Perencanaan	14.127.100	13.548.000	14.127.100	14.127.100	100%	5 Dokumen, 6 Orang	5 Dokumen, 6 Orang	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	15.000.000	10.361.500	15.000.000	15.000.000		5 Dokumen	5 Dokumen	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.030.448.000	1.857.726.019	2.030.448.000	2.030.448.000		100%	100%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	2.030.448.000	1.857.726.019	2.030.448.000	2.030.448.000		18 Pegawai	18 Pegawai	

7.01.0 1.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18.690.000	18.791.000	18.690.000	18.690.000	100%	100%	100%	100%
7.01.0 1.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	18.690.000	18.791.000	18.690.000	18.690.000	100%	25 Pegawai	25 Pegawai	100%
7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		56.493.150	47.774.600	56.493.150	56.493.150	100%	100%	100%	100%
7.01.0 1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor (ATK) yang dicukupi	27.710.950	25.879.600	27.710.950	27.710.950	100%	45 Jenis	45 Jenis	100%
7.01.0 1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	7.972.000	11.950.000	7.972.000	7.972.000	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
7.01.0 1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.211.000	1.680.000	2.211.000	2.211.000	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
7.01.0 1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan, Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	18.599.200	8.265.000	18.599.200	18.599.200	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		39.937.400	0	39.937.400	39.937.400	100%	100%	100%	100%
7.01.0 1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor	39.937.400	0	39.937.400	39.937.400	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		292.737.150	268.602.642	292.737.150	292.737.150		100%	100%	
7.01.0 1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.189.150	25.270.000,00	34.189.150	34.189.150		2 Rekening	2 Rekening	

7.01.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	20.230.000,00	15.000.000	15.000.000	100%	10 Unit	10 Unit	100%
7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi, Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Keamanan Kantor	243.548.000	223.102.642,00	243.548.000	243.548.000		11 Orang	11 Orang	
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71.653.900	116.520.500	71.653.900	71.653.900		100%	100%	
7.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Surat yang Terbayarkan	1.400.000	1.159.500,00	1.400.000	1.400.000	100%	6 Unit	6 Unit	100%
7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di pelihara	20.253.900	23.703.000,00	20.253.900	20.253.900	100%	6 Unit	6 Unit	100%
7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor	50.000.000	91.658.000,00	50.000.000	50.000.000	100%	2 Gedung	2 Gedung	100%
07.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.607.400	38.474.150	13.607.400	13.607.400	100%	100%	100%	100%
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	13.607.400	38.474.150	13.607.400	13.607.400	100%	100%	100%	100%

7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.607.400	38.474.150,00	13.607.400	13.607.400	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
07.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		36.921.700	8.727.900	36.921.700	36.921.700	100%	100%	100%	100%
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pelaksana Kegiatan Musrenbang Kecamatan	25.921.700	8.727.900	25.921.700	25.921.700	100%	100%	100%	100%
7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	16.590.500	7.560.500,00	16.590.500	16.590.500	100%	1 Kali	1 Kali	100%
7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.331.200	8.727.900,00	9.331.200	9.331.200	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%
07.01. 03	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan PKK di Kecamatan	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0%	1 Tahun	1 Tahun	0%
7.01.0 3.2.06	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Kegiatan PKK di Kecamatan	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0%	1 Tahun	1 Tahun	0%
07.01. 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA		8.007.500	8.045.900	8.007.500	8.007.500	100%	100%	100%	100%
7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang Difasilitasi	8.007.500	8.045.900	8.007.500	8.007.500	100%	18 Desa	18 Desa	100%

7.01.0 5.2.01. 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Ia	Jumlah Desa yang Difasilitasi	8.007.500	8.045.900	8.007.500	8.007.500	100%	18 Desa	18 Desa	100%
07.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		35.503.600	18.749.000	35.503.600	35.503.600	9975%	100%	100%	9975%
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	35.503.600	18.749.000	35.503.600	35.503.600	9975%	100%	100%	9975%
7.01.0 6.2.01. 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	9.148.700	8.276.600	9.148.700	9.148.700	100%	18 Desa	18 Desa	100%
7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	15.779.300	9.058.600	15.779.300	15.779.300	100%	18 Desa	18 Desa	100%
7.01.0 6.2.01. 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	10.575.600	1.413.800	10.575.600	10.575.600	0	18 Desa	18 Desa	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Laren Tahun 2025, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Renja Tahun 2025 Kec.Laren

Laren merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Laren sebagaimana terlampir :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan

[illegible]

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Laren dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Laren :
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Laren sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Laren.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Laren hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Laren sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Laren terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;
 - d. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan Laren selaras dengan Visi Kepala Daerah yaitu Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya saing, adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke4 (empat) yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.
 - e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Laren.
 - a) Tantangan :
 - Terbatasnya sarana prasarana yang terkait,

- Sedangkan Blangko dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan terbatas sehingga menghambat kelancaran proses.

b) Peluang :

- Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ;
- Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan.
- Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Larenterlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

f. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4 Review Terhadap Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran.
2. Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil Masyarakat (sistem batton up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan

pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum. Sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsure Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan-Kecamatan Laren disini berperan sebagai fasilitator untuk menampung usulan Desa yang akan diakomodir langsung oleh Perangkat Daerah yang terkait.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Hasil penelaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi khususnya penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD Kecamatan Laren adalah :

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS JAWA TIMUR	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN
1	2	3	4	5	6
	1. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu	a.Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalagunaan Obat – obat terlarang dan Narkoba b.Mensukseskan Pemilu serentak.	Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Pengelolaan Potensi Konflik serta Pencegahan tindak kriminal demi kesuksesan pesta demokrasi (Pemilu)	a. Meningkatkan Kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) , dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah. b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI, Polri c. Meningkatkan Trantibum dengan Penegakan Perda Kabupaten Lamongan.

3. 2. Tujuan dan Sasaran PD

Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Laren Tahun 2025 didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Laren yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Laren.

3. 3. Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Penyusunan Program dan Kegiatan PD yang direncanakan dalam Renja PD mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Pemutakhiran Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 maupun Renja Tahun 2023.
4. SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada.
5. Indikator Kinerja Kunci (KK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.
6. Target Indikator Strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang tertuang dalam SDG's, Rencana Aksi Daerah (RAD), Nota Kesepakatan Daerah (MoU), dan Indikator Kinerja Utama Provinsi.
 - a. Faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya :
 1. Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yaitu :

"Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi"

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan 2 (Dua) tujuan yaitu:

- | | |
|-------------------|---|
| Tujuan 1 | : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan diKecamatan |
| Sasaran | : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan. |
| Indikator Sasaran | : 1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat |

Tujuan 2 :Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Sasaran Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Indikator Sasaran :

1. Persentase jumlah Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Renja Tahun 2025 Kec.Laren.
 2. Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK) .
 3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan sebagaimana Tabel dibawah ini.

Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU	JUMLAH PROGRAM PENDUDKUNG PN (KORTEKRENBANG)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Laren	5	22		1	Camat Laren

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KAB. LAMONGAN KEC. LAREN
TAHUN 2025

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun-1	Tahun N										Tahun +1	
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah(Rp)		
Kecamatan Laren																				
7					UNSURKEWILAYAHAN				Rp.2.203.975.048	Rp.17.151.100			Rp.2.221.126.148	Rp.2.227.367.533	Rp.0			Rp.2.227.367.533	Rp.2.416.540.800,00	
7	01				KECAMATAN				Rp.2.203.975.048	Rp.17.151.100			Rp.2.221.126.148	Rp.2.227.367.533	Rp.0			Rp.2.227.367.533	Rp.2.416.540.800,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp.2.055.225.048	Rp.17.151.100			Rp.2.072.376.148	Rp.2.155.792.533	Rp.0			Rp.2.155.792.533	Rp.2.254.290.800,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp.30.000.000				Rp.30.000.000	Rp.16.588.200				Rp.16.588.200	Rp.33.000.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.6.589.000				Rp.6.589.000	Rp.11.000.000,00	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.5.000.000				Rp.5.000.000	Rp.11.000.000,00	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.4.999.200				Rp.4.999.200	Rp.11.000.000,00	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp.1.647.092.048				Rp.1.647.092.048	Rp.1.848.684.933				Rp.1.848.684.933	Rp.1.705.000.000,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.1.627.092.048				Rp.1.627.092.048	Rp.1.829.684.933				Rp.1.829.684.933	Rp.1.683.000.000,00	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.9.000.000				Rp.9.000.000	Rp.11.000.000,00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.11.000.000,00	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														Rp.16.500.000,00	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa												Rp.16.500.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp.83.677.000				Rp.83.677.000	Rp.48.567.400				Rp.48.567.400	Rp.92.540.800,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.9.300.000				Rp.9.300.000	Rp.9.300.000				Rp.9.300.000	Rp.11.000.000,00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.30.249.000				Rp.30.249.000	Rp.15.139.400				Rp.15.139.400	Rp.33.000.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.22.000.000,00	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.4.128.000				Rp.4.128.000	Rp.4.128.000				Rp.4.128.000	Rp.4.540.800,00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.22.000.000,00	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Rp.17.151.100			Rp.17.151.100		Rp.0			Rp.0	Rp.44.000.000,00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, M aduran, Semua Kel/Desa			Rp.17.151.100			Rp.17.151.100		Rp.0			Rp.0	Rp.44.000.000,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp.258.452.000				Rp.258.452.000	Rp.211.952.000				Rp.211.952.000	Rp.283.250.000,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PBJT- Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.40.000.000				Rp.40.000.000	Rp.40.000.000				Rp.40.000.000	Rp.44.000.000,00	
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.17.500.000				Rp.17.500.000	Rp.17.500.000				Rp.17.500.000	Rp.19.250.000,00	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.200.952.000				Rp.200.952.000	Rp.154.452.000				Rp.154.452.000	Rp.220.000.000,00	
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun -1	Jumlah											
									Tahun N	Tahun N										Tahun +1
										Sebelum					Sesudah					
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah(Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah(Rp)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp.36.004.000				Rp.36.004.000	Rp.30.000.000				Rp.30.000.000	Rp.80.000.000,00	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.5.185.000				Rp.5.185.000	Rp.5.185.000				Rp.5.185.000	Rp.5.500.000,00	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	- Kab. Lamongan, Laren, Sem ua Kel/Desa		Rp.14.815.000				Rp.14.815.000	Rp.14.815.000				Rp.14.815.000	Rp.16.500.000,00	

7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.16.004.000				Rp.16.004.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.58.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.16.500.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerahyangAdadi Kecamatan				Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.16.500.000,00
7	01	02	2.02	0003	PeningkatanEfektifitasPelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.16.500.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp.38.750.000				Rp.38.750.000	Rp.12.000.000				Rp.12.000.000	Rp.46.750.000,00
7	01	03	2.01		KoordinasiKegiatanPemberdayaan Desa				Rp.14.750.000				Rp.14.750.000	Rp.0				Rp.0	Rp.11.550.000,00
7	01	03	2.01	0001	PeningkatanPartisipasiMasyarakat dalam Forum Musyawarah PerencanaanPembangunandiDesa	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.14.750.000				Rp.14.750.000	Rp.0				Rp.0	Rp.11.550.000,00
7	01	03	2.06		PemberdayaandanKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				Rp.24.000.000				Rp.24.000.000	Rp.12.000.000				Rp.12.000.000	Rp.35.200.000,00
7	01	03	2.06	0003	PeningkatanKetahananPangan Keluarga	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.24.000.000				Rp.24.000.000	Rp.12.000.000				Rp.12.000.000	Rp.35.200.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.11.000.000				Rp.11.000.000	Rp.22.000.000,00
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan PenegakanPeraturanDaerahdan Peraturan Kepala Daerah				Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.11.000.000				Rp.11.000.000	Rp.22.000.000,00
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/SinergidenganPerangkat DaerahyangTugasdanFungsinyadi Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau KepolisianNegaraRepublikIndonesia	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.11.000.000				Rp.11.000.000	Rp.22.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp.70.000.000				Rp.70.000.000	Rp.38.575.000				Rp.38.575.000	Rp.77.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi,Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa				Rp.70.000.000				Rp.70.000.000	Rp.38.575.000				Rp.38.575.000	Rp.77.000.000,00
7	01	06	2.01	0002	FasilitasiAdministrasiTata Pemerintahan Desa	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.22.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan DesadanPendayagunaanAsetDesa	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.40.000.000				Rp.40.000.000	Rp.20.000.000				Rp.20.000.000	Rp.44.000.000,00
7	01	06	2.01	0013	FasilitasiPenyusunanPerencanaan Pembangunan Partisipatif	- DanaAlokasiUmum (DAU)	- Kab.Lamongan,Laren,Sem ua Kel/Desa		Rp.10.000.000				Rp.10.000.000	Rp.8.575.000				Rp.8.575.000	Rp.11.000.000,00
Jumlah									Rp.2.203.975.048	Rp.17.151.100			Rp.2.221.126.148	Rp.2.227.367.533	Rp.0			Rp.2.227.367.533	Rp.2.416.540.800,00

BABV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan Laren sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Laren merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

B. CATATAN PENTING

Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD tahun 2025, baik jenis Program / Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

1. Program Dan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang direncanakan dengan Anggaran terkadang pada pertengahan Tahun sering berubah dikarenakan ada penambahan/Mutasi Pegawai yang menyebabkan kurangnya Anggaran pada kegiatan ini.
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sangat efisien dan diperlukan untuk kemandirian lingkungan Kantor Kecamatan Laren dalam meneruskan pembangunan Pagar Kiri Kantor Kecamatan Laren yang belum terealisasi.

- C. Kaidah–Kaidah pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Laren dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- D. Rencana Tindak lanjut Perangkat Daerah Kecamatan Laren pada tahun 2025 mendatang akan menetapkan 5 Program dan 12 Kegiatan sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Laren Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 (satu) Tahun kedepan. Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Laren Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Laren tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.


CAMAT LAREN
SYAM TEGUH WAHONO, S.H., M.M
Pembina Tk.I
NIP. 197110311992031002